



## **PEMERINTAH KABUPATEN BONE**



### ***RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA (RENA 2022***

**KECAMATAN MARE  
KABUPATEN BONE**

## KATAPENGANTAR

Puji Syukur Alhamdulillah kami panjatkan Kehadirat Allah SWT atas limpahan Rahmat taufik serta hidayahNya sehingga kami dapat menyusun Rancangan Akhir Renja tahun 2022. Rancangan Akhir Renja ini merupakan wujud dari model penyelenggaraan pemerintahan yang baik yang tertuang dalam Rancangan Akhir Renja Kecamatan Mare tahun 2022.

Rancangan Akhir Renja tahun 2022 memaparkan evaluasi kinerja Kecamatan Mare tahun 2020 dan 2021 serta program dan kegiatan yang akan dilaksanakan ditahun 2022 sehingga diharapkan dapat dijadikan pedoman bagi aparatur dalam menentukan prioritas-prioritas pekerjaan sesuai tugas pokok dan fungsinya. Di sisilain Rancangan Akhir Renja ini juga berisikan indikator-indikator kinerja sehingga dapat dijadikan evaluasi atau tolak ukur kinerja yang bermanfaat untuk mengetahui capaian kinerja Kecamatan Mare dalam mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Bone.

Demikian Rancangan Akhir Renja ini kami susun sebagai acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan sehingga menjadi tolak ukur dalam penyelenggaraan Pemerintahan yang baik di Kecamatan Mare di Tahun 2022.

Mare, 20 Januari 2022

**CAMAT MARE**



**A. MUH AWALUDDIN, S.STP**

Pangkat: Pembina

Nip: 198002221999121 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN.....	1
I.1 Latar Belakang.....	1
I.2 Landasan Hukum.....	2
I.3 Maksud dan Tujuan.....	5
I.4 Sistematika Penulisan.....	6
BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA KEKAMATAN TAHUN LALU.....	8
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Mare Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Mare.....	8
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	18
2.3 Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	26
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	26
2.5 Penelaahan Usulan Program dan kegiatan Masyarakat.....	37
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	38
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi.....	38
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD.....	39
3.3 Program dan Kegiatan.....	39
BAB IV RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	42
BAB V PENUTUP.....	47

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahun 2022 Kecamatan Mare Kabupaten Bone merupakan dokumen perencanaan pembangunan Kecamatan Mare, dan pelaksanaan tugas pelayanan public sebagai tindak lanjut dari perumusan kebijakan strategis dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, menetapkan program dan kegiatan untuk mewujudkan bentuk dan sifat pelayanan yang dicapai pada masa satu tahun.

Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2022 Kecamatan Mare dilandasi oleh semangat Otonomi Daerah dimana Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintah menurut asas Otonomi dan Tugas Pembantuan, hal ini diperkuat dengan pernyataan Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 4 ayat 1, Pemberian Kewenangan Kepala Daerah kepada Camat, dimaksudkan untuk mempercepat proses terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, dengan adanya kewenangan diharapkan pemerintah daerah mampu meningkatkan daya saing melalui prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan dalam pembangunan, serta meningkatkan daya guna potensi Kecamatan dan keanekaragaman sumber daya manusia.

Dalam melaksanakan kewenangan dengan memperhatikan keterkaitan antara Perencanaan Daerah dengan Perencanaan Kecamatan, maka perencanaan tujuan Kecamatan mendukung Perencanaan Pembangunan Daerah, sehingga tujuan maupun sasaran pembangunan yang ingin dicapai Pemerintah Kecamatan bersinergi dengan tujuan maupun sasaran yang ingin dicapai oleh Pemerintah Daerah.

Rancangan Akhir Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2022 Kecamatan Mare memuat susulan program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Mare serta kerangka pendanaan daerah, Rancangan Akhir Renja Kecamatan Mare secara substansial sesuai dengan Visi, Misi, agenda Kecamatan dan rencana resmi daerah (RKPD, RPJMD dan Renstra Kecamatan) dengan Renja K / L dan Renja Provinsi/Kabupaten serta tindak

lanjutnya, dengan proses Penyusunan RAPBD, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Perencanaan Pembangunan harus mencakup 5 (lima) pendekatan yaitu:

1. Pendekatan politis, dimana dengan adanya pemilihan Kepala Daerah secara langsung, maka program-program yang ditawarkan oleh kadindat Kepala Daerah pada saat melakukan kampanye harus dianggap sebagai proses perencanaan pembangunan.
2. Pendekatan teknokratik dimana perencanaan pembangunan harus menggunakan metode dan kerangka berfikir ilmiah.
3. Pendekatan partisipatif yang masyarakat bahwa proses penyusunan perencanaan pembangunan harus melibatkan masyarakat sebagai pihak yang berkepentingan (Stakeholder) terhadap pembangunan.
4. Pendekatan Top-Down (Atas-Bawah) yaitu bahwa penyusunan perencanaan pembangunan harus memperhatikan program-program jenjang pemerintah di atasnya.
5. Pendekatan Botom-Up (Bawah - Atas) yaitu penyusunan perencanaan pembangunan harus memperhatikan kepentingan dan kebutuhan Stake holder atau jenjang pemerintah dibawahnya, hasil proses penyusunan rencana pembangunan, Top-Down dan Botom-Up diselaraskan melalui musyawarah perencanaan pembangunan atau musrenbang.

Rancangan Akhir Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Mare Tahun 2022 disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan, mengacu kepada Rancangan RKPD Kabupaten Bone Tahun 2022, Renstra Kecamatan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya.

## 1.2 Landasan Hukum

Peraturan Perundang-undangan yang menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Mare Kabupaten Bone Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Landasan Idiil : Pancasila
2. Landasan Konstitusionil : UUD1945
3. Landasan Operasional
  1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah tingkat II di Sulawesi;

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
9. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
10. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
11. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2019 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
12. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan standar pelayanan minimal keuangan daerah;
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah;

17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata cara penyusunan rencana pembangunan Nasional;
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan penyelenggaraan pemerintah daerah kepada pemerintah, laporan keterangan pertanggung jawaban kepala daerah kepada **DPRD** dan Informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat;
19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintah daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah;
21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
22. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang rencana tata ruang wilayah Nasional;
23. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang rencana pembangunan jangka menengah Nasional Tahun 2010-2014;
24. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan barang jasa pemerintah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan keuangan daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan menteri dalam negeri nomor 21 Tahun 2011;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;

28. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem perencanaan pembangunan daerah;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 08 Tahun 2008 tentang Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Daerah Kabupaten Bone (Lembaran daerah Kabupaten Bone Tahun 2008 Nomor 8);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan tata kerja Kecamatan dan Kelurahan Pemerintahan Kabupaten Bone;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 29 Tahun 2006 tentang Perubahan atas peraturan daerah nomor 7 tahun 2008 tentang Rencana pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Bone tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 9);
32. Peraturan Bupati Bone Nomor 42 Tahun 2012 tentang Petunjuk pelaksanaan Musrenbang yang terintegrasi.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Mare Tahun 2022 disusun dengan maksud menyediakan dokumen perencanaan tahunan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolak ukur penilaian kinerja serta sebagai perangkat untuk mencapai harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bagi Kecamatan Mare pada Tahun 2022.

Rancangan Akhir Renja Kecamatan Mare Kabupaten Bone Tahun 2022 disusun dengan tujuan sebagai berikut:

1. Sebagai pedoman bagi Kecamatan Mare dalam menentukan Prioritas program dan kegiatan tahun 2022.
2. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Kecamatan Mare dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi.
3. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Kecamatan Mare untuk memenuhi arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahun 2022.



## 1.4 Sistematika Penulisan

### Bab I Pendahuluan

#### Latar Belakang

Berisi uraian Latar Belakang yang dikemukakan secara ringkas tentang Rancangan Akhir Rencana Kerja Kecamatan, proses penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Kecamatan, keterkaitan antara Rancangan Akhir Rencana Kerja Kecamatan dengan dokumen RKPD, Renstra Kecamatan, dengan Rancangan Akhir Rencana Kerja KIL dan Rencana Kerja Provinsi, serta tindaklanjutnya

#### Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Kecamatan, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Kecamatan.

#### Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Kecamatan.

#### Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Rancangan Akhir Rencana Kerja Kecamatan, serta susunan garis besar isi dokumen

### Bab II Hasil Evaluasi Pelaksanaan Rancangan Akhir Rencana Kerja Kecamatan Tahun Lalu

pada bab ini memuat kajian (Review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1).

Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Mare tahun lalu dan capaian Renstra Kecamatan

Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan

Isu-isu Penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan

Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan masyarakat

### Bab III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

#### Telaahan terhadap Kebijakan Nasional,

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaah yang menyangkut arahan kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan. Deskripsi, untuk mengisi sub – sub ini mengacu pada kertas kerja bagian telaahan terhadap kebijakan nasional.

Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan,

Bagian ini berisikan mengenai penjelasan:

- a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.
- b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan.
- c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal **RKPD**, baik jenis program/kegiatan, Pagu indikator, maupun kombinasi keduanya.
- d. Tabel rencana program dan kegiatan.

#### Program dan Kegiatan

Menjelaskan faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap perumusan Program dan Kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan.

Bab IV Rancangan Akhir Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan

Bab V Penutup

## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA KECAMATAN TAHUN LALU**

#### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Mare Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Mare.**

Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra Kecamatan Mare merupakan dokumen Perencanaan organisasi perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat penjabaran perencanaan tahunan dan rencana strategis Kecamatan Mare. Tercapai atau tidaknya atas pelaksanaan kegiatan program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah yang merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan dalam mencapai tujuan: tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggung jawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja Kecamatan Mare menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran dari hasil yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Kecamatan Mare selama tahun 2020 dan tahun berjalan 2021 serta perkiraan target 2022.

Sejalan dengan berjalannya waktu, pelaksanaan Renja Kecamatan Mare 2020 telah terlewati, Berbagai Program dan Kegiatan pembangunan yang dituangkan dalam Renja Tahun 2020 telah dilaksanakan, dan untuk mengetahui hasil yang telah dicapai maka perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh, yang kesemuanya itu tertuang dalam Tabel T-C.29 berikut :

Tabel T-C.29.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan  
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020 Berdasarkan Permendagri 90  
Provinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Bone

Nama Perangkat Daerah: KECAMATAN MARE

PERMENDAGRI 90

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) /Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluarah- Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2020)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Ca paian Progra mdan Kegiat an s/d tahun berj alah (Tahun 2 021)	Tingkat Capaian Realisasi Target R enstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8-(7/6)	9	10=( 5+7+9)	11=(10/4)
7	UNSUR KEWILAYAHAN									
7 01	KECAMATAN									

7	01	01				<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Cakupan Realisasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (%)</b>										
7	01	01	2	01		<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah Realisasi Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>										
7	01	01	2	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah yang Tersusun (Dokumen)	7	1	1	1	100%	6	8	15%		
7	01	01	2	01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD yang Tersusun (Dokumen)	6	1	1	1	100%	1	3	50%		
7	01	01	2	01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang Tersusun (Dokumen)	6	1	1	1	100%	1	3	50%		
7	01	01	2	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Pelaporan Capaian Kinerja Yang Tersusun dan dilaporkan sesuai kewajiban perangkat daerah (Dokumen)	6	1	1	1	100%	1	3	50%		

7	01	01	2	01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun (Dokumen)	6	1	1	1	100%	1	3	50%
7	01	01	2	02		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>								
7	01	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12	12	12	12	100%	12	36	30%
7	01	01	2	05		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>								
7	01	01	2	05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Pasang)	30	0	0	0	0%	30	30	50%
7	01	01	2	05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya (Pasang)	20	0	0	0	0%	20	20	50%
7	01	01	2	06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terlaksana</b>								

7	01	01	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Penyediaan Alat Tulis Kantor (ATK); penunjang administrasi perkantoran sesuai rencana kebutuhan (Paket)	60	60	60	60	100%	60	180	30%
7	01	01	2	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Penyediaan Logistik Kantor (Paket)	12	12	12	12	100%	12	36	30%
7	01	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (Paket)	12	12	12	12	100%	12	36	30%
7	01	01	2	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Pembayaran Media yang menyediakan Bahan Bacaan (Kali)	12	12	12	12	100%	12	36	30%
7	01	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Kegiatan Rutin Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tupoksi Organisasi yang diikuti (Kegiatan)	264	198	198	198	100%	218	614	33%

7	01	01	2	07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>												
7	01	01	2	07	02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Unit)	1	0	0%	0	0%	1	1	100%				
7	01	01	2	07	05 Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel (Paket)	3	0	0%	0	0%	0	0	0%				
7	01	01	2	07	06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Paket)	4	0	0%	0	0%	4	0	25%				
7	01	01	2	08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>												
7	01	01	2	08	02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Listrik, Wifi dan Air yang Terbayarkan (Rekening)	36	24	24	24	100%	36	84	34%				



7	01	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Administrasi yang Mendapatkan Jasa Pelayanan Umum Kantor Selama Setahun (Kali)	108	108	108	108	100%	108	324	30%
7	01	01	2	09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>								
7	01	01	2	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional (Unit)	48	48	48	48	100%	48	144	30%
7	01	01	2	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya (Paket)	12	12	12	12	100%	12	26	17%
7	01	02				<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (%)</b>								

7	01	02	2	01		<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>								
7	01	02	2	01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Kegiatan)	1	1	1	1	100%	1	3	30%
7	01	03				<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>Cakupan Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (%)</b>								
7	01	03	2	01		<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>								
7	01	03	2	01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan FKKS dan TKSK (Dokumen)	2	2	2	2	100%	2	6	30%
7	01	03	2	02		<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang Terlaksana</b>								

7	01	03	2	02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan (Kegiatan)	2	2	2	2	100%	2	6	30%
7	01	03	2	02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kegiatan)	2	2	2	2	100%	2	6	30%
7	01	04				<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>Cakupan Pelaksanaan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum (%)</b>								
7	01	04	2	01		<i>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</i>	<i>Jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</i>								
7	01	04	2	01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Kali)	12	12	12	12	100%	12	26	17%
7	01	06				<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>Cakupan Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)</b>								

7	01	06	2	01		<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>Jumlah Realisasi Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>									
7	01	06	2	01	01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Realisasi Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	0	12	12	12	100%	12	26	26%	
7	01	06	2	01	17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Desa (Laporan)	12	12	12	12	100%	12	26	17%	

## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan

Pengukuran Kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja dasar dilakukan melalui Penetapan indikator kinerja yaitu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan, indikator kegiatan meliputi indikator masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome), manfaat (benefits) dan dampak (Impacts). Indikator indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan dan indikator lainnya. Penetapan indikator ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

Selanjutnya dilakukan Analisis Capaian Kinerja atas sasaran yang didasarkan atas hasil pengukuran kinerja kegiatan dalam suatu sasaran dilakukan analisis pencapaian kinerja atas sasaran tersebut. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja utama, pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan kinerja.

Kecamatan Maresebagai salah satu, perangkat daerah yang dalam pelaksanaan tugasnya tidak saja berurusan dengan aspek pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan administrasi pemerintah kecamatan semata melainkan juga merupakan ujung tombak pelayanan masyarakat ditingkat kecamatan. Oleh karena itu capaian kinerja pelayananannya lebih banyak dianalisis dari sudut pandang tugas pokok dan fungsi kecamatan dan juga indikator kinerja output yang dihasilkan dari program dan kegiatan yang telah dilaksanakan.

Berikut pencapaian kinerja pelayanan perangkat daerah Kecamatan Mare yang dijabarkan ke dalam Tabel T-C.30 berikut

Tabel T-C.30.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kantor Camat Mare  
Provinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Bone

PERMENDAGRI/90												
No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	TargetRenstraPerangkatDaerah				RealisasiCapaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun2019	Tahun2020	Tahun2021	Tahun2022	Tahun2019	Tahun2020	Tahun2021	Tahun2022	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Jumlah Realisasi												
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												
1	Jumlah Dokumen Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah yang Tersusun (Dokumen)			7	6	7	6	7	6	7	6	
2	Jumlah Koordinasi danPenyusunan DokumenRKA-SKPD yangTersusun(Dokumen)			1	1	1	1	1	1	1	1	
3	Jumlah Koordinasi danPenyusunan DokumenPerubahanRKA-SKPDyang Tersusun(Dokumen)			1	1	1	1	1	1	1	1	

4	Jumlah Dokumen Pelaporan Capaian Kinerja Yang Tersusun dan dilaporkan sesuai kewajiban perangkat daerah (Dokumen)		1	1	1	1	1	1	1	1	
5	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun (Dokumen)		1	1	1	1	1	1	1	1	
<b>Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>											
6	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		12	12	12	12	12	12	12	12	
<b>Jumlah Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>											
7	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Pasang)		0	0	20	20	0	0	20	20	

8	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya (Pasang)		0	0	30	30	0	0	30	30	
<b>Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terlaksana</b>											
9	Jumlah Paket Penyediaan Alat Tulis Kantor (ATK) penunjang administrasi perkantoran sesuai rencana kebutuhan (Paket)		60	60	60	60	60	60	60	60	
10	Jumlah Paket Penyediaan Logistik Kantor (Paket)		12	12	12	12	12	12	12	12	
11	Jumlah Paket Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (Paket)		12	12	12	12	12	12	12	12	
12	Jumlah Pembayaran Media yang menyediakan Bahan Bacaan (Kali)		12	12	12	12	12	12	12	12	



13	Jumlah Kegiatan Rutin Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tupoksi Organisasi yang diikuti (Kegiatan)		180	198	218	240	180	198	218	240	
	<b>Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>										
14	Jumlah Pengadaan Kendaran Dinas Operasional atau Lapangan (Unit)		0	0	1	0	0	0	1	0	
15	Jumlah Pengadaan Mebel (Paket)		0	0	3	3	0	0	3	3	
16	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Paket)		0	0	4	4	0	0	4	4	
	<b>Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>										

17	Jumlah Rekening Listrik, Wifi dan Air yang Terbayarkan (Rekening)		24	36	36	36	24	36	36	36	
18	Jumlah Tenaga Administrasi yang Mendapatkan Jasa Pelayanan Umum Kantor Selama Setahun (Kali)		108	108	108	108	108	108	108	108	
<b>Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>											
19	Jumlah Pemeliharaan Kendaran Dinas Operasional (Unit)		48	48	48	48	48	48	48	48	
20	Jumlah Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya (Paket)		12	12	12	12	12	12	12	12	
<b>Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan</b>											

21	Jumlah Kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan instansi Vertikal Terkait (Kegiatan)		1	1	1	1	1	1	1	1	
<b>Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>											
22	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan FKKS dan TKS (Dokumen)		2	2	2	2	2	2	2	2	
<b>Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang Terlaksana</b>											
23	Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan (Kegiatan)		2	2	2	2	2	2	2	2	
24	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kegiatan)		2	2	2	2	2	2	2	2	

	<b>Jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>									
25	Jumlah Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Insansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Kali)	12	12	12	12	12	12	12	12	
	<b>Jumlah Realisasi Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>									
26	Jumlah Realisasi Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	0	17	17	17	17	17	17	17	
27	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Desa (Laporan)	17	17	17	17	17	17	17	17	

### 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Secara umum

isu-isu penting

strategis yang

dihadapi oleh Pemerintah Kecamatan Mare adalah sebagai berikut:

1. Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Camat kepada para Pemangku Jabatan Fungsional di Bidang Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di kantor Camat Mare.
2. Pelayanan Prima Kecamatan Mare sebagai salah satu SKPD di Pemerintah Kabupaten Bone yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta peraturan yang berlaku.
3. Peningkatan Kapasitas Aparatur dan penambahan kuantitas aparatur. Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat.
4. Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah Kecamatan Mare harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan infrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.

### 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review adalah aktivitas untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Rencana disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Mare serta mengacu kepada Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Bone. Sebagai dokumen perencanaan pembangunan dan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka RKPD merupakan pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Guna mencapai target sasaran kinerja kegiatan Kecamatan Mare diperlukan kesungguhan dari pengelola anggaran dalam melaksanakan program dan kegiatan. Dalam rangka

mewujudkan keseimbangan pelaksanaan program maka pengawasan dan evaluasi harus dilaksanakan secara konsisten sehingga dapat segera dilakukan koreksi terhadap penyimpangan arah pelaksanaan.

- a. Perbandingan rancangan awal RKPD dengan hasil analisa kebutuhan. Dalam RKPD 2019 Kecamatan Marem mengusulkan 5 Program dengan 12 kegiatan dan 27 Sub Kegiatan.
- b. Penjelasan mengenai temuan dan catatan penting. Program dan kegiatan pada Kecamatan Marem mengacu pada Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Bone. Adapun review terhadap rancangan awal RKPD terkait prioritas program/kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk setiap SKPD tertuang dalam tabel T-C.31 berikut ini:

Tabel T-C.31.

Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun  
2022 Provinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Bone

Nama Perangkat Daerah: Kantor Camat Mare

PERMENDAGRI/90

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target	Pagu	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target	Kebutuhan	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	indikatif (Rp.000)	(7)	(8)	(9)	(10)	Dana Rp.000	Penting
					(6)					(11)	(12)
	<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>										
	<b>KECAMATAN</b>										
1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>		<b>Cakupan Realisasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (%)</b>			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>		<b>Cakupan Realisasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (%)</b>			
	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>		<i>Jumlah Realisasi Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>			<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>		<i>Jumlah Realisasi Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>			
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Mare	Jumlah Dokumen Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah yang Tersusun (Dokumen)	6	24.889.700	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Mare	Jumlah Dokumen Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah yang Tersusun (Dokumen)	6	27.378.670	

	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kecamatan Mare	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD yang Tersusun (Dokumen)	1	4.400.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kecamatan Mare	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD yang Tersusun (Dokumen)	1	4.840.000
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kecamatan Mare	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang Tersusun (Dokumen)	1	4.400.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kecamatan Mare	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang Tersusun (Dokumen)	1	4.840.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Mare	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja Yang Tersusun dan dilaporkan sesuai kewajiban perangkat daerah (Dokumen)	7	3.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Mare	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja Yang Tersusun dan dilaporkan sesuai kewajiban perangkat daerah (Dokumen)	7	3.850.000
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Mare	Jumlah Dokumen Evaluasi Daerah yang tersusun (Dokumen)	1	4.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Mare	Jumlah Dokumen Evaluasi Daerah yang tersusun (Dokumen)	1	4.400.000
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>			<b>Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>			<b>Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		



	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Mare	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12	8.995.153.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Mare	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12	9.894.668.300
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		<b>Jumlah Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>			<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		<b>Jumlah Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Kecamatan Mare	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Pasang)	30	7.500.000	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Kecamatan Mare	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Pasang)	30	8.250.000
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kecamatan Mare	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya (Pasang)	20	5.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kecamatan Mare	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya (Pasang)	20	5.500.000
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terlaksana</b>			<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terlaksana</b>		

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Mare	Jumlah Paket Penyediaan Alat Tulis Kantor (ATK) penunjang administrasi perkantoran sesuai rencana, kebutuhan (Paket)	60	33.550.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Mare	Jumlah Paket Penyediaan Alat Tulis Kantor (ATK) penunjang administrasi perkantoran sesuai rencana, kebutuhan (Paket)	60	36.905.000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Mare	Jumlah Paket Penyediaan Logistik Kantor (Paket)	12	48.453.900	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Mare	Jumlah Paket Penyediaan Logistik Kantor (Paket)	12	53.299.290
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kecamatan Mare	Jumlah Paket Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (Paket)	12	11.572.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kecamatan Mare	Jumlah Paket Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (Paket)	12	12.729.200

	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kecamatan Mare	Jumlah Pembayaran Mediayang menyediakan Bahan Bacaan(Kali)	12	3.960.000	Penyediaan Bacaandan Bahan Peraturan Perundang-undangan	Kecamatan Mare	JumlahPembayaran Mediayang menyediakanBahan Bacaan(Kali)	12	4.356.000
	PenyelenggaraanRapatKoordinasidanKonsultasi SKPD	Kecamatan Mare	Jumlah KegiatanRutin Koordinasidan KonsultasiPelaksanaanTupoksi Organisasi yang di ikuti(Kegiatan)	240	139.668.485	Penyelenggaraan RapatKoordinasidanKonsultasiSKPD	Kecamatan Mare	Jumlah KegiatanRutin Koordinasidan KonsultasiPelaksanaanTupoksi Organisasi yang di ikuti(Kegiatan)	240	153.635.334
	<b>Pengadaan Barang Milik DaerahPenunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>JumlahPengadaanBarang MilikDaerah PenunjangUrusanPemerintahDaerah</b>			<b>Pengadaan Barang MilikDaerah PenunjangUrusan PemerintahDaerah</b>		<b>JumlahPengadaanBarang MilikDaerah PenunjangUrusanPemerintahDaerah</b>		
	PengadaanKendaraanDinas OperasionalatauLapangan	Kecamatan Mare	PengadaanKendaraanDinasOperasional atauLapangan(Unit)	0	0	KendaraanDinas Operasional atauLapangan	Kecamatan Mare	PengadaanKendaraanDinasOperasional atauLapangan(Unit)	0	0
	PengadaanMebel	Kecamatan Mare	Jumlah PengadaanMebel(Paket)	3	28.600.000	PengadaanMebel	Kecamatan Mare	Jumlah PengadaanMebel(Paket)	3	31.460.000

	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Mare	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Paket)	4	14.597.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Mare	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Paket)	4	16.056.700
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Airdan Listrik	Kecamatan Mare	Jumlah Rekening Listrik, Wifi dan Air yang Terbayarkan (Rekening)	36	34.611.990	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Airdan Listrik	Kecamatan Mare	Jumlah Rekening Listrik, Wifi dan Air yang Terbayarkan (Rekening)	36	38.073.188
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Mare	Jumlah Tenaga Administrasi yang Mendapatkan Jasa Pelayanan Umum Kantor Selama Setahun (Kali)	108	64.015.776	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Mare	Jumlah Tenaga Administrasi yang Mendapatkan Jasa Pelayanan Umum Kantor Selama Setahun (Kali)	108	70.417.354

	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan Mare	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional (Unit)	48	93.622.540	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan Mare	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional (Unit)	48 102.984.794
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Mare	Jumlah Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya (Paket)	12	20.846.788	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Mare	Jumlah Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya (Paket)	12 22.931.466
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (%)			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (%)	
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	

	Koordinasi/SinergiPerencanaandan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahdengan Perangkat Daerah danInstansiVertikalTerkait	Kecamatan Mare	Jumlah KegiatanKoordinasi/SinergiPerencanaan danPelaksanaanKegiatanPemerintahandengan PerangkatDaerah danInstansiVertikalTerkait(Kegiatan)	1	30.545.000	Koordinasi/SinergiPerencanaan danPelaksanaan KegiatanPemerintahan denganPerangkat Daerah danInstansiVertikalTerkait	Kecamatan Mare	Jumlah KegiatanKoordinasi/SinergiPerencanaan danPelaksanaanKegiatanPemerintahandengan PerangkatDaerah danInstansiVertikalTerkait(Kegiatan)	1	33.600.490
3	<b>PROGRAM PEMBERDAYAANMASYARAKAT DESA DANKELURAHAN</b>		<b>CakupanPelaksanaanKegiatanPemberdayaanMasyarakat Desadan Kelurahan(%)</b>			<b>PROGRAMPEMBERDAYAANMASYARAKAT DESADANKELURAHAN</b>		<b>CakupanPelaksanaanKegiatanPemberdayaanMasyarakat Desadan Kelurahan(%)</b>		
	<i>Koordinasi Kegiatan PemberdayaanDesa</i>		<i>JumlahKoordinasiKegiatanPemberdayaanDesa</i>			<i>Koordinasi KegiatanPemberdayaanDesa</i>		<i>JumlahKoordinasiKegiatanPemberdayaanDesa</i>		
	Peningkatan Efektifitas KegiatanPemberdayaan Masyarakat diWilayahKecamatan	Kecamatan Mare	Jumlah DokumenEvaluasi Pelaksanaan FKKSdan TKSK(Dokumen)	2	58.031.600	Peningkatan EfektifitasKegiatanPemberdayaanMasyarakat di WilayahKecamatan	Kecamatan Mare	Jumlah DokumenEvaluasi Pelaksanaan FKKSdan TKSK(Dokumen)	2	63.834.760
	<i>KegiatanPemberdayaanKelurahan</i>		<i>Jumlah KegiatanPemberdayaanKelurahan yang Terlaksana</i>			<i>Kegiatan PemberdayaanKelurahan</i>		<i>Jumlah KegiatanPemberdayaanKelurahan yang Terlaksana</i>		

	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kecamatan Mare	Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan (Kegiatan)	2	539.000.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kecamatan Mare	Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan (Kegiatan)	2	592.900.000
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kecamatan Mare	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kegiatan)	2	6.600.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kecamatan Mare	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kegiatan)	2	7.260.000
			<b>Cakupan Pelaksanaan Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum (%)</b>					<b>Cakupan Pelaksanaan Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum (%)</b>		
4	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMANDAN KETERTIBAN UMUM</b>					<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMANDAN KETERTIBAN UMUM</b>				
	<i>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</i>		<i>Jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</i>			<i>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</i>		<i>Jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</i>		
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Mare	Jumlah Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12	29.700.000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Mare	Jumlah Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12	32.670.000
5	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>		<b>Cakupan Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)</b>			<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>		<b>Cakupan Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)</b>		

	<i>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</i>		<i>Jumlah Realisasi Fasilitas i, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</i>	<i>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</i>			<i>Jumlah Realisasi Fasilitas i, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</i>			
	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kecamatan Mare	Jumlah Realisasi Fasilitas i, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	12	4.356.000	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kecamatan Mare	Jumlah Realisasi Fasilitas i, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	12	4.791.600
	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Kecamatan Mare	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Desa (Laporan)	12	6.655.000	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Kecamatan Mare	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Desa (Laporan)	12	7.320.500



## 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

1. Bahwa Usulan Program/ Kegiatan yang dibahas di dalam Musrenbang mekanismenya diawali dari penggalan gagasan dari tingkat Dusun / Lingkungan melibatkan unsur Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Unsur Perempuan dan Organisasi Kemasyarakatan sehingga menghasilkan usulan program yang dibawa ke forum Musrenbangdes.
2. Di Forum Musrenbangdes menghasilkan skala prioritas usulan tingkat Desa selanjutnya ditunjuk perwakilan dari Desa untuk mengawal usulan tersebut di Forum Musrenbang Tingkat Kecamatan.
3. Hasil Musrenbang Kecamatan merupakan : Skala prioritas program yang telah sesuai dengan kebutuhan real masyarakat serta isu - isu penting dari masing – masing SKPD yang ada pada Unit Pelaksana Teknis di tingkat Kecamatan.

Pemerintah Kecamatan Mare dalam pelaksanaan pembangunan menggunakan suatu model yang disebut Sistem Manajemen Pembangunan Partisipatif (SMPP) yang bermakna bahwa ide pembangunan tidak dari pemerintah kepada masyarakat (Top Down) tetapi juga mendorong partisipasi masyarakat untuk memberikan usulan – usulan pembangunan kepada Pemerintah (Bottom Up) dalam wadah kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) mulai dari tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan hingga tingkat kabupaten.

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Sebagai suatu keharusan bagi setiap Perangkat Daerah untuk menetapkan tujuan sasaran dan program kegiatan, maka dari itu perludiukur kinerja dari setiap Perangkat Daerah termasuk untuk dapat mengimplementasikan kebijakan-kebijakan Pemerintah baik Tingkat Kata, Provinsi maupun Kebijakan Nasional.

Penentuan prioritas dan sasaran pembangunan nasional Tahun 2022 tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Bone sesuai tema Tahun 2022 adalah **"Penguatan Kapasitas Daerah Dalam Meningkatkan Investasi Yang Kondusif Menuju Sustainable Development"**.

Adapun Prioritas Nasional, Propinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Bone terkait dengan prioritas pembangunan Daerah Kabupaten Bone Tahun 2022 disajikan dalam table berikut ini:

No	Nasional	Sulawesi Selatan	Kabupaten Bone
1	Rancangan Teknokratik RPJMD 2020-2024	Perbaikan tata kelola pemerintahan dan pelayanan public	Peningkatan tata kelola pemerintahan untuk mendukung Pelayanan public yang berkualitas
2		Penguatan infrastruktur wilayah	Pengembangan ekonomi daerah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat
3		Pengembangan Kawasan pusat pertumbuhan	Peningkatan pelayanan Pendidikan, kesehatan, dan sosial Dasar lainnya
4		Penurunan kesenjangan social ekonomi	Percepatan pembangunan daerah yang bertumpu pada desa dan Kawasan perdesaan
5		Pembangunan Manusia	Pengembangan inovasi daerah untuk mendukung pembangunan Daerah dan pelayanan publik
6		Pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui hilirisasi komoditas	Penciptaan iklim investasi yang kondusif untuk mendorong Pengembangan usaha
7		Pelestarian lingkungan hidup	Stabilitas keamanan, ketertiban, ketentraman dalam kemajemukan masyarakat

Tabel diatas menunjukkan adanya sinkronisasi kebijakan nasional dan provinsi dengan arah kebijakan dan program Kabupaten Bone.

### 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Perumusan dan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD Kecamatan Mare yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja renstra Kecamatan Mare 2020-2023.

Dengan menitik beratkan pada Visi dan Misi yang telah ditetapkan Rencana Strategis maka kecamatan Mare mempunyai *tujuan*:

1. Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia dibidang pelayanan
2. Meningkatkan sarana dan prasarana yang berbasis ilmu teknologi
3. Meningkatkan tertib administrasi utama bidang pelayanan

Dengan *sasaran* sebagai berikut:

1. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dibidang pelayanan
2. Tersedianya sarana dan prasarana pendukung yang berbasis teknologi
3. Meningkatkan keefapan dan kecepatan dalam memberikan pelayanan kepada warga masyarakat
4. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam kehidupan masyarakat.

### 3.3 Program dan Kegiatan

- a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan Kecamatan Mare 2022

Dalam merumuskan program kegiatan, Kecamatan Mare mempertimbangkan beberapa faktor penting. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap perumusan program dan kegiatan antara lain:

1. Pencapaian visi dan misi Kepala Daerah,
  2. Pencapaian SDGs;
  3. Pengentasan kemiskinan,
  4. Pencapaian NSPK dan SPM,
  5. Pendayagunaan potensi ekonomi daerah,
  6. Pengembangan daerah terisolir.
- b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan Dengan memperhatikan arah pembangunan daerah Kabupaten Bone pada Tahun 2022, maka Kecamatan Mare merumuskan Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahun 2022 yang terdiri dari 5 Program, 12 Kegiatan, dan 27 Sub Kegiatan. Adapun Program, Kegiatan, dan Sub Kejadiannya yang tersebut sebagai berikut: .

## **1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/Kota**

### **□ Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
5. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

### **□ Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

### **□ Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**

1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
2. Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya

### **□ Administrasi Umum Perangkat Daerah**

1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

### **□ Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

1. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
2. Pengadaan Mebel
3. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

### **□ Pengadaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

### **□ Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

## **2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**

### **□ Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**

1. Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait

### **3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**

#### **□ Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**

1. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat, di Wilayah Kecamatan

#### **□ Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**

1. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
2. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

### **4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**

#### **□ Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**

1. Sinergitas dengan Kepolisian, Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

### **5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**

#### **□ Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**

1. Fasilitas Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
2. Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya

## **BAB IV**

### **RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Rancangan Akhir Rencana Kerja (RENJA) merupakan acuan setiap perangkat daerah dalam mengoperasionalkan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi jangka menengah daerah. Dengan rencana kerja yang terukur dan didukung oleh pendanaan, maka menjadi suatu instrumen dan indikator yang digunakan dalam upaya mewujudkan pembangunan daerah agar lebih terarah. Penyusunan Rancangan Akhir Renja berpedoman pada Renstra Kecamatan Mare dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bone.

Penyusunan Rancangan Akhir Renja bukanlah kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD. Rencana Kerja Kecamatan Mare merupakan bagian yang utuh dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Mare. Keduanya merupakan penjabaran dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang sistem perencanaan pembangunan nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman tata cara pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, dengan demikian program dan kegiatan pembangunan yang ada pada dokumen perencanaan diatur secara rinci dalam Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahun 2022.

Rumusan Rencana Kerja dan pendanaan Perangkat daerah Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam table berikut ini:



PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH  
ABUPATEN BONE  
TAHUN 2022

tit Orië : 7.1.0.00.0.00.05.0000 let Mr  
Sb Utt Owanial : 7.01.0.00.0.00.05.0000 Atamu, Mar

[illegible]



.d				rwngLr retes t Des Oen Prov tan	ndtier NOR			fencetan			Pguledttt p.	um Der	Ctn Peng	mean tj C. ft			
					Cape / Pre@m	turn fgrin	all Kn	Lokal Otp egirtan	Target Cpetsn re					Tur Cpi Mp		at Or le (	
									Progr	Ker. buegl	Ms Keglt			Tole# t l	Tr		
'	'	O	2,04	O	fele, r r t ded Mn tel 6c-0	lor, et wt el mrjelmdlt frer Tell Persglut fr. l	ha Me ttt ladled en Me t f. l a 'out Or nll yang di f	runt , lea bee e Ad. dtt th fer, glt Ort yg a	Mk. le«, rs, an Mhral	\$o Per	es plat	100%	4.900.00o	fele fr%tr Lr, On lell Lr	rt. - v Capel Mhj l d. tr OR fell fern. l. rt	10#%re	4ts4. coo
1	'	@	.C		longed n leg Mitt Der	Penunjwng tm Pmrntint Deh							«t44400			44ta	
'	Ot	01	1.07	O	Pew g dan H Orwellat Lw U	to to n r Cal. rj bdlurtt ror fell lnglnt fr	huti8 - er bl.. Opre le	rt. Page erg lit brat endangrnan rtrta ft	lat. , mer, - Kl. n	10lorn	fut	400%	25.000.000	d frat team On Alelual	far t. ft. rt. Clej hduet Pron Tellerr. ht Doh	40de »	41.\$4. boo
I	Ot	et	,m7	Os	Peden el	front t. rt. Cl rj« loll. tr reran 'elude Pert brat	lth « gu du n l. tel al sa Meth	mg milt Ore lem jagrun fer mortertu h fag Lr	tel. le, Mr, le. d Klun	\$6d#re	4slut	100%	41f.\$44.000	fr%fr um G. Allmel h b	rat Capel Khje loll. rte Pren fl er. gut	00#%ran	16a.4.44
7	O	O	1.07	O«	fed lewd. tn lin Manry	Cpl Mherje mute Pron fell frnglt fh	hlh Pm. et fit II Aly	lrrg melt fer lg «gtwt fon rrtt fr	le, l. . turn	40d furn	tit	100	2. as0.,00o	Triter Le+ b. knl	lent t trt Cal Mmrj led. tr reg fl /wt rah	100#ere	6MP79.194
I	t	q1	OS		wydi Jes Pe rtr fonthen Den								1164.1400			d As to	
					freed .a lea ft t «tn	Jule fl rt l	Pert Pery MOM	tat, rm«,					Om		Pra t - tort		
7	O	et	,As	O	alid, bye Alr Lr	Cl mjrja tr«dluter frogrs Tell Pett fews. h	Ltrtk, tit a Mr yang terry «rn (elnlg	bole Albert le lent fr yr. gt. r	Me mata, mu Selurahan	100Per	26 eten	400%	18.406.000	frenefr Ue All 4	Cl rj l. lute ror Tlud Peg. et	400#er	4.102.400
'	Of	Ot	2.0	04	fey«d. an Pelayanan Leliter	fer r t Rata-wt Cal. erjeldll. et Prow fl gt	bl. he . . Atulralyg hprta ho.	rt. envy elm, All, lier. el le Pwgt, Oh	MI. le, here, n. lrrtaan	4Ofern	Orm	100%	4.04400	bm. roller the ES	rt. et ft wt Cpl rjeldl-tor rgr Tell Pat	100 r	1 421.400
1	dt	d	n		Ilheranbu rg beer nnja ng lman Pmrnt tan Derh								2«211260			727a	
7	Of	Of	2,0s	Oa	ferro fellrn, rye el me, Pelt, d forth ed - fl C%r Lige	fort t tr«t Caln Cheep l dft frown flu. l Pert . at lent	utah Pery«fla n - feller. n. lye ' e U - Ped. al ertlt villrn Ola f 6port tag Lr	rrt. . lawn lffe lend. mgr rtwtat berg	Gd. m. «, le, - M r	10d#ran	unit	100%	36.423.290	bm fminer th be Aloll	feet. . rt rt. Caln her hdutor Program Tetu let. at fr. h	100rs	«67.4\$0.12
7	04	Ot	2,0%	0o	' w it r. let on fl% deg Gord mg Liry	att Cl j litter Pu reran fell le tut	hull litre h. belltel @dug tor	rt lend. rt «ll, fi tr, n ll, wrye r.	Ma. le«, tr, n lrrh	104Pen	42#Mel t	10¢ %	\$7.006.0o	fr mole Ghee	ls. ft. Cpl n rja lmdl tr Pre fell ergo	400 fr	«dt. 42%
7	Ot	o7			OOAM PENTELENOARAN	AN DAN PELAYAN UBL							1a4t44¢			sot 00	
7	01	m	2,01		Mensi #ory lrr Magi fern feat Keat								14414 6¢			lMe	
I	04	o2	2.mt	11	tu de4 r er and rue ten lat ' rirth lent Oh d	C lulu ul girt Polan ' rort n Ghee	hrlet lewdlnld turn...dere fen glut rrt	rt r. el feted as legi u rthmt n tu glut l - tan	Gd. le6, ll, le. Ketron	10Oran	f#ult	100 %	t4.41.460	bra frrr b. Allele th	Cal jpan Raa fl gt lg ortrt. hn th	10or	tsod



				Indtilt rj				Roncana Ta u 22				Petraju fence T C #3													
				Copel Pren		Klaren fl eglatn		alKgtn		Loli Ott age		Tarp Caplan Kine4		gund ut0.)		rot Der		Cetta lent.		Tort Cape I .er		w lun Dr.le.w			
										ren		ture ut pit		Mott git						Tele Llet		fr		ma (	
1	at	0		64000.000											ttid2idood										
1	01	0	01	1\$ 06d 00o											mes										
				ea faun 20.2				fog ii.at ppl				Perun Maj tee Fohn 2													
				Cetla Pent		Target Copelan 1e rj4		Tot Alar		forge		ltn Dr.afPw led (													
7	01	0		fr.ft										fa.alt fro.« o											
7	01	0		erst. fe.gt										1,0000											
1	bt	0	0	46.000.00o										21.7\$0.000											
1	o	0	1,1	460000oo										o2std 0oo											
7	01	0	1,02 02	1@7.290.600 U m Om.										1.004.7\$6.co											
7	01	0	03	\$7 790.066										4 790 000											
7	01	04	91	27.006o										ootoe											
7	01	04	91	7boo b										040o 0o											
7	01	04	01	27.006.00o										\$6.00.boo											
7	01	0	01	24 00000										sot000											
7	01	0	01	4 4 00										24646											
f Ot u ,01 r j mrrgn O. d				erg iibu O.										Palu ra (AD6, TAD				Filtal, t							
Mr. el				bl.a dft.d				trig rwltd				O len u al													
ifrhye												le, -													

## **BABV**

### **PENUTUP**

Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Mare Tahun 2022 disusun berdasarkan Visi dan Misi Kabupaten Bone yang tertuang dalam Rencana Strategis Perencanaan Daerah Kecamatan Mare Tahun 2018 - 2023 yang dalam penyusunan program dan kegiatan diselenggarakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bone. Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah yang merupakan perencanaan program dan kegiatan satu tahun kedepan dibuat secara efektif dan partisipatif, dengan mengupayakan semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap aspirasi masyarakat dan stakeholders (pihak yang terkait dan berkepentingan) di Kecamatan Mare, untuk menjamin keberhasilan program / kegiatan Renja PD (program tahunan) yang merupakan implementasi dari Renstra Perangkat Daerah (program 5 tahunan), maka perlu dilakukan upaya sebagai berikut:

1. Pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan dalam Rancangan Akhir Rencana Kerja secara berkelanjutan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan.
2. Pengevaluasian, pengkajian hasil pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan untuk melakukan penilaian terhadap kinerja seluruh aparatur.
3. Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah Kantor Kecamatan Mare selain menjadi program/kegiatan selama tahun 2022 juga berfungsi sebagai peningkatan kinerja aparatur serta barometer untuk menjadi umpan balik untuk perencanaan pada tahun berikutnya.

Rencana program di Kecamatan Mare tahun 2022 merupakan program pemberdayaan masyarakat serta kegiatan kerja aparatur Kecamatan Mare pada periode Tahun 2022. Dalam pengembangannya akan disesuaikan dengan dinamika perkembangan kebutuhan masyarakat di Kecamatan Mare yang pelaksanaannya bersifat efisien, tepat sasaran dan berdaya guna serta berhasil guna sesuai dengan Visi dan Misi Kabupaten Bone yang ditetapkan.